

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Purwokerto berperan strategis sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba, sekaligus menjadi lokasi rujukan bagi narapidana bermasalah dari berbagai wilayah. Namun, peningkatan angka residivisme menunjukkan bahwa proses reintegrasi antara minat dan kebutuhan narapidana terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi dan evaluasi program pemberdayaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto dengan menggunakan teori Empowerment Evaluation sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 13 orang, meliputi 3 petugas Lapas dan 10 narapidana residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi pemberdayaan di Lapas masih menghadapi inkonsistensi fundamental antara prosedur partisipatif yang diidealkan dengan implementasi yang bersifat top-down dan instruktif. Meskipun telah dilaksanakan lima tahapan komunikasi pemberdayaan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, sosialisasi, motivasi dan dukungan psikologis, hingga pemantauan dan evaluasi narapidana masih ditempatkan sebagai objek pasif tanpa keterlibatan substansial dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip democratic participation dan community ownership sebagaimana ditekankan dalam pendekatan empowerment evaluation. Hasil evaluasi program mengidentifikasi 13 aspek kritis yang menunjukkan disparitas signifikan antara program pembinaan wajib (seperti pembinaan keagamaan dengan partisipasi 100% dan rating 9,5) dan program pembinaan kemandirian sukarela (seperti pemasaran produk dengan partisipasi 6,6% dan rating 2,9). Evaluasi juga mengungkap berbagai hambatan sistemik, antara lain dominasi pembinaan keagamaan tanpa dukungan pembinaan intelektual formal, keterbatasan instruktur profesional, infrastruktur bangunan yang usang, minimnya dukungan pemasaran dan ketidaksesuaian program dengan minat narapidana. Temuan tersebut menegaskan perlunya transformasi paradigmatis dari model pembinaan yang bersifat instruktif menuju sistem pemberdayaan partisipatif yang berorientasi pada penguatan kapasitas individu, diversifikasi pendanaan, pengembangan kemitraan multipihak, serta institusionalisasi evaluasi partisipatif secara sistematis.

Kata kunci: komunikasi pemberdayaan, evaluasi program, empowerment evaluation, narapidana, Lapas Narkotika

ABSTRACT

The Class IIB Narcotics Correctional Facility (Lapas Narkotika) in Purwokerto serves a strategic role as a rehabilitation and correctional institution for drug-related inmates, as well as a referral facility for problematic prisoners from other regions. However, the increasing rate of recidivism indicates that the social reintegration process remains suboptimal. This condition suggests a gap between inmates' interests and needs and the empowerment programs implemented. This study aims to analyze the communication process and program evaluation of inmate empowerment at the Class IIB Narcotics Correctional Facility in Purwokerto using the Empowerment Evaluation theory as its analytical framework. This research employs a qualitative descriptive method, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation. The study involved 13 informants, consisting of 3 correctional officers and 10 recidivist inmates. The findings reveal a fundamental inconsistency between the participatory procedures idealized in empowerment communication and their top-down and instructive implementation. Although five stages of empowerment communication have been conducted—ranging from needs identification, program planning, socialization, motivation and psychological support, to irregular monitoring and evaluation—the process remains dominated by hierarchical patterns that position inmates as passive recipients rather than active participants in decision-making. This contradicts the principles of democratic participation and community ownership emphasized in the empowerment evaluation approach. Comprehensive evaluation identified 13 critical aspects showing a significant disparity between mandatory development programs (such as religious guidance with 100% participation and a 9.5 rating) and voluntary independence programs (such as product marketing with 6.6% participation and a 2.9 rating). The evaluation further uncovered systemic limitations, including the dominance of religious over intellectual training, lack of professional instructors, outdated infrastructure, insufficient marketing support, and a mismatch between inmates' interests and available programs. These findings highlight the necessity of a paradigmatic transformation from an instructive training model toward a participatory empowerment system that emphasizes individual capacity building, diversified funding, multi-stakeholder partnerships, and institutionalized participatory evaluation to achieve a genuinely empowering correctional system capable of fostering sustainable social reintegration.

Keywords: empowerment communication, program evaluation, empowerment evaluation, inmates, narcotics correctional facility